

**INOVASI HALAL, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING
BERKELANJUTAN UMKM: PERSPEKTIF EKOSISTEM
REGIONAL DI BANYUWANGI, JAWA TIMUR, INDONESIA**

Azy Athoillah Yazid^{1*}

Received: May 12, 2026 | Accepted: June 02, 2026 | Published: June 28, 2026

¹STAI Darul Ulum Banyuwangi; azyathoillah@gmail.com

*Correspondence: azyathoillah@gmail.com

Abstract: The development of the halal industry in Banyuwangi requires an integrated innovation ecosystem that connects knowledge production, halal certification, entrepreneurship, community engagement, and technological development. This article proposes a university-based Halal Hub model as an innovation framework to strengthen the halal ecosystem and support the development of halal-oriented Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Banyuwangi. The model integrates five interconnected functions: (1) research and knowledge production focusing on halal product development, certification processes, and MSME needs; (2) certification assistance through direct support for documentation, understanding requirements, and navigating the halal certification process; (3) entrepreneurship incubation to facilitate students and alumni in developing halal-oriented business models; (4) community engagement through collaboration with village governments, MSME associations, and community organizations to improve halal literacy and facilitate certification; and (5) living-lab activities for testing digital traceability systems, circular-economy practices, and halal product innovations. Through this integrated approach, the Halal Hub is positioned as a collaborative platform linking universities, government, MSMEs, communities, and the private sector. The proposed model is expected to strengthen innovation capacity, improve MSME access to halal certification, encourage the adoption of digital and sustainable practices, and contribute to the development of an inclusive, innovative, and sustainable halal ecosystem in Banyuwangi.

Keywords: *halal innovation; Halal Hub; Banyuwangi; halal certification; MSMEs; entrepreneurship; living lab*

1. Pendahuluan

Ekonomi halal Indonesia sedang mengalami transformasi mendasar dari agenda yang berorientasi pada kepatuhan menuju agenda industri dan kewirausahaan yang lebih luas

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Sertifikasi halal tetap menjadi persyaratan institusional inti, tetapi implikasi kompetitifnya semakin meluas ke kualitas produk, transparansi rantai pasok, kepercayaan konsumen, akses pasar, dan kapabilitas organisasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa fase berikutnya dari wajib sertifikasi halal dimulai pada 18 Oktober 2026 dan mencakup, antara lain, makanan dan minuman, produk olahan hewan, kosmetik, produk farmasi dan kesehatan tertentu, bahan dan aditif, serta barang konsumsi tertentu (BPJPH, 2026a, 2026b). Pemerintah juga menekankan bahwa implementasi memerlukan koordinasi antarlembaga dan kesiapan yang lebih kuat dari pelaku usaha.

Pasar halal global bernilai lebih dari US\$3 triliun dan terus berkembang di sektor pangan, farmasi, kosmetik, fesyen modest, pariwisata, dan keuangan syariah. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan sekitar 87% dari 280 juta penduduknya beragama Islam, menempati posisi strategis dalam membentuk standar dan praktik halal. Ekonomi halal telah ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Masterplan Ekonomi Syariah dan Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal (KNEKS, 2019, 2021). Meskipun demikian, industri halal Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi kapabilitas di tingkat perusahaan.

Kabupaten Banyuwangi, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, menjadi contoh nyata persinggungan dinamika tersebut. Dikenal sebagai "The Sunrise of Java", Banyuwangi mengembangkan model regional yang khas dengan menggabungkan kekuatan pertanian, sektor pariwisata yang berkembang, serta ekosistem sertifikasi halal yang semakin maju. Perekonomian kabupaten ini tumbuh 5,65% pada tahun 2025, melampaui pertumbuhan Jawa Timur dan nasional, dengan sektor pertanian menyumbang 26,28% dari Produk Domestik Regional Bruto (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2026). Terdapat sekitar 207.000 UMKM yang beroperasi di wilayah ini, sehingga menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi difusi kapabilitas halal (Suara Muhammadiyah, 2026).

Digitalisasi menambah dimensi lain. Indonesia mencatat 59,53 juta pengguna QRIS dan 42,75 juta merchant QRIS pada kuartal keempat 2025, dengan mayoritas merchant adalah UMKM; volume transaksi QRIS meningkat 139,99% secara year-on-year (Bank Indonesia, 2026). Integrasi blockchain, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan dalam rantai pasok halal menjadi jalan yang menjanjikan untuk meningkatkan ketertelusuran dan kepercayaan konsumen (Emerald Publishing, 2025). Namun, adopsi teknologi ini di kalangan UMKM Indonesia masih terbatas.

Keberlanjutan menjadi dimensi ketiga. Agenda ekonomi sirkular Indonesia menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan model bisnis sirkular. Bappenas dan mitra mengidentifikasi kendala struktural dalam plastik dan daur ulang, termasuk rantai pasok yang terfragmentasi, pengumpulan yang tidak memadai, kesenjangan teknologi, dan kapasitas daur ulang yang belum optimal (Bappenas-GGGI, 2025). Tingkat daur ulang limbah Indonesia masih rendah, hanya 10–12%, sementara industri halal nasional tumbuh pesat.

Dengan demikian, halal, digitalisasi, dan sirkularitas tidak dapat diperlakukan sebagai agenda terpisah; ketiganya dapat dirancang sebagai kapabilitas yang saling memperkuat.

2. Bahan dan Metode

Artikel ini menggunakan desain studi kasus kualitatif eksploratif. Unit analisis adalah ekosistem inovasi halal yang sedang berkembang di Kabupaten Banyuwangi, yang dikaji melalui dokumen kebijakan nasional, studi akademik terbaru yang diterbitkan antara tahun 2023 dan 2025, bukti regional dari Banyuwangi, dan kasus pendidikan kontekstual. Komponen dokumenter bersumber dari BPJPH, BPS, publikasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan studi peer-review mengenai sertifikasi halal, UMKM, pariwisata halal, dan pengembangan halal regional.

Tinjauan literatur menggunakan sintesis tematik pada lima konstruk: (1) sertifikasi halal dan kapabilitas UMKM; (2) ketertelusuran digital dan kepercayaan halal; (3) ekonomi sirkular dan keberlanjutan halal; (4) kewirausahaan halal dan hub inovasi universitas; serta (5) ekosistem halal regional. Sumber diidentifikasi melalui penelusuran jurnal terindeks Scopus, Google Scholar, dan repositori institusi, dengan kriteria inklusi publikasi dari tahun 2023 ke atas untuk memastikan kemutakhiran.

Kasus kontekstual berkaitan dengan ekosistem inovasi halal di Banyuwangi, dengan perhatian khusus pada program "Si Kedip Wangi" dan peran Halal Center UIMSYA Blokagung. Kasus ini digunakan secara ilustratif untuk mengkaji bagaimana fasilitasi pemerintah daerah dan pusat halal berbasis universitas dapat berfungsi sebagai platform pengembangan kapabilitas bagi UMKM, kewirausahaan, dan sertifikasi halal. Kasus ini tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa intervensi tertentu menyebabkan hasil tertentu, karena materi yang tersedia tidak menyediakan perbandingan terkontrol atau data hasil longitudinal.

Analisis dilakukan melalui sintesis tematik pada lima konstruk: (1) jaminan halal dan kepercayaan; (2) kewirausahaan dan pengembangan model bisnis; (3) teknologi digital dan ketertelusuran; (4) sirkularitas dan keberlanjutan; serta (5) kolaborasi universitas-industri-pemerintah. Lima figur dikembangkan sebagai perangkat sintesis konseptual. Figur-figur tersebut tidak mewakili model statistik atau estimasi kausal. Tujuannya adalah untuk memperjelas hubungan antarkonstruk dan menyediakan proposisi yang dapat diuji dalam studi empiris di masa depan.

Keterbatasan utama metodologi ini adalah tidak memungkinkan estimasi kausal. Lima figur adalah perangkat sintesis konseptual, bukan model statistik. Kasus kontekstual bersifat ilustratif, bukan representatif. Penelitian mendatang harus menggunakan desain longitudinal, kelompok pembandingan yang dipadankan, dan data panel multiwilayah untuk menguji hubungan yang diusulkan secara empiris.

3. Hasil

3.1. Kerangka Inovasi Halal Terintegrasi

mengintegrasikan dukungan kebijakan dan institusional, jaminan halal, kepercayaan digital, keberlanjutan, kapabilitas kewirausahaan, kolaborasi universitas-industri-pemerintah, dan ekosistem regional ke dalam jalur inovasi. Kerangka ini menempatkan jaminan halal sebagai fondasi sekaligus menekankan bahwa daya saing berkelanjutan bergantung pada interaksi kapabilitas organisasi, ketertelusuran digital, sirkularitas, dan dukungan ekosistem.

Kerangka ini disusun di sekitar empat pilar fondasi: (1) Kebijakan dan Institusi (BPJPH, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kemenag); (2) Jaminan Halal (22.091 sertifikat halal, 2.500 sertifikat PIRT, mekanisme deklarasi mandiri); (3) Kepercayaan Digital (SIHALAL, QRIS, ketertelusuran digital); dan (4) Keberlanjutan (prinsip ekonomi sirkular, ekowisata halal). Pilar-pilar ini menopang kapabilitas UMKM dan kewirausahaan, yang selanjutnya diperkuat oleh kolaborasi universitas-industri-pemerintah dan pengembangan ekosistem regional.

Untuk Banyuwangi secara khusus, kerangka ini menyoroti peran kritis program "Si Kedip Wangi" sebagai inovasi institusional yang menjembatani persyaratan regulasi dan kapasitas UMKM. Halal Center UIMSYA Blokagung berfungsi sebagai perantara berbasis universitas yang menghubungkan riset, pendampingan sertifikasi, dan dukungan UMKM. Sektor pariwisata menyediakan peluang pasar bagi produk dan layanan bersertifikat halal, menciptakan mekanisme tarikan permintaan yang melengkapi dorongan sisi penawaran dari sertifikasi.

3.2. Kewirausahaan sebagai Mekanisme Translasi

Kewirausahaan menerjemahkan prinsip halal dan keberlanjutan menjadi solusi yang menghadap pasar. Urutan Problem–Evidence–Solution–Business Model–Impact mengharuskan wirausahawan mengidentifikasi celah konkret, memvalidasinya dengan bukti, mengembangkan solusi berorientasi halal, membangun logika bisnis yang layak, dan mengevaluasi dampak multidimensi. Lingkaran pembelajaran memungkinkan pengujian, adaptasi, dan penskalaan.

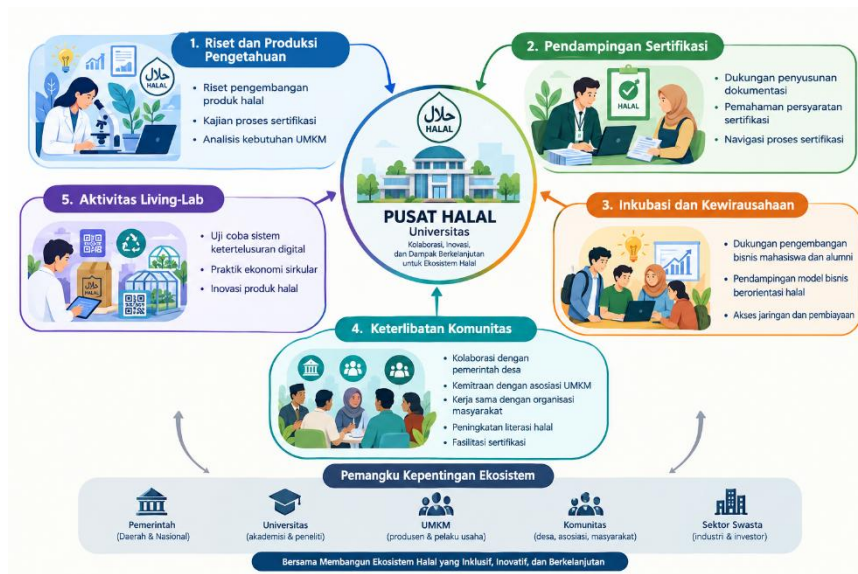
Dalam konteks Banyuwangi, kewirausahaan berfungsi sebagai penghubung kritis antara sertifikasi halal dan daya saing pasar. UMKM di kabupaten ini, yang didukung oleh fasilitasi pemerintah dan pusat halal berbasis universitas, semakin diposisikan untuk menerjemahkan kepatuhan halal menjadi diferensiasi produk, akses pasar, dan pertumbuhan bisnis. Program "Si Kedip Wangi" menyediakan fondasi legalisasi dan sertifikasi yang memungkinkan wirausahawan untuk fokus pada pengembangan bisnis daripada hambatan administratif

Lingkaran pembelajaran kewirausahaan—Test → Measure → Learn → Adapt → Scale—sangat relevan bagi UMKM Banyuwangi yang beroperasi di berbagai sektor termasuk pengolahan pangan, perikanan, pertanian, kerajinan, dan jasa pariwisata. Pusat Layanan Kemasan milik pemerintah kabupaten, yang telah memproduksi sekitar 43.000 kemasan, merupakan intervensi praktis yang meningkatkan kesiapan pasar produk bersertifikat halal

3.3. Universitas sebagai Hub Inovasi Halal

Universitas dapat berfungsi sebagai perantara ekosistem dengan menggabungkan riset, inkubasi, pendampingan sertifikasi, dan aktivitas living-lab. Model hub ini menghubungkan pengetahuan akademik dengan UMKM, startup, pemerintah dan badan sertifikasi, industri, dan investor. Model ini juga menciptakan peluang untuk pembelajaran kewirausahaan experiential.

Di Banyuwangi, Halal Center UIMSYA Blokagung menjadi contoh model hub ini. Sejak didirikan pada tahun 2024, pusat ini telah mengembangkan 33 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) aktif dan mendukung penerbitan sekitar 200 sertifikat halal untuk usaha lokal (UIMSYA, 2026). Pusat ini berpartisipasi dalam rapat koordinasi nasional dan berkomitmen untuk memperluas rekrutmen P3H melalui Learning Management System.



Gambar 1. Diagram Ekosistem Halal Hub.

Kasus Banyuwangi menunjukkan bahwa universitas dapat berfungsi sebagai platform yang relatif netral di mana lembaga pemerintah, badan sertifikasi, UMKM, dan mahasiswa berkolaborasi dalam tantangan bersama. Peran ini sangat penting di kabupaten di mana mekanisme koordinasi institusional mungkin kurang berkembang dibandingkan di wilayah metropolitan utama

4. Pembahasan

4.1. Jalur Regional Banyuwangi

Banyuwangi harus diinterpretasikan sebagai konfigurasi regional yang khas yang menggabungkan karakteristik berorientasi produksi dan berorientasi destinasi. Kabupaten ini menyediakan platform pertanian dan UMKM yang luas di mana kapabilitas penskalaan menjadi pusat, sekaligus menawarkan peluang pariwisata dan pengembangan destinasi di mana jaminan halal dapat dihubungkan dengan pengalaman ramah Muslim.

Jalur Banyuwangi dapat dicirikan sebagai:

Produksi pertanian/perikanan → Pengolahan UMKM → Sertifikasi halal (difasilitasi pemerintah) → Diversifikasi produk → Integrasi pasar wisata → Diferensiasi berbasis destinasi

Pendorong bersama dari jalur ini meliputi: sertifikasi halal; kepercayaan dan ketertelusuran digital; kewirausahaan; dukungan universitas; praktik ekonomi sirkular; dan keterkaitan pariwisata-UMKM.

Indikator kunci untuk Banyuwangi meliputi:

- UMKM: Sekitar 207.000 usaha
- Sertifikat halal: 22.091 (2026)
- Sertifikat PIRT: 2.500 (sejak 2019)
- Pertumbuhan ekonomi: 5,65% (2025)
- Kunjungan wisata: 240.632 selama Lebaran 2026
- Infrastruktur pusat halal: UIMSYA Blokagung, UNIBA Banyuwangi
- Aset wisata halal: Pantai Syariah Santen, inisiatif ekowisata halal

Jalur ini bersifat komplementer, bukan kompetitif, dengan wilayah lain. Kombinasi khas Banyuwangi antara kapasitas produksi, potensi pariwisata, dan tata kelola lokal yang proaktif menciptakan kondisi untuk pendekatan terintegrasi yang menghubungkan produksi hulu dengan pengembangan pasar hilir

4.2. Dari Kepatuhan Halal ke Bisnis Kompetitif Berkelanjutan

bergerak dari kepatuhan halal formal menuju halal-by-design, ketertelusuran digital, operasi sirkular dan berkelanjutan, kepercayaan dan akses pasar, nilai terdiferensiasi, dan bisnis kompetitif berkelanjutan. Umpan balik dari pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan menghubungkan hasil pasar kembali ke adaptasi organisasi.

Untuk Banyuwangi, jalur ini diterjemahkan menjadi perkembangan bertahap:

1. Kepatuhan dan jaminan halal: UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui program yang difasilitasi pemerintah seperti "Si Kedip Wangi" dan pendampingan berbasis universitas dari Halal Center UIMSYA.
2. Kapabilitas halal-by-design: Perusahaan mengintegrasikan pertimbangan halal ke dalam pengembangan produk, pemilihan pemasok, dan desain proses sejak awal.
3. Kepercayaan dan ketertelusuran digital: UMKM mengadopsi catatan digital dasar, informasi produk berbasis QR, dan sistem ketertelusuran jika dibenarkan secara ekonomi.
4. Operasi tangguh dan sirkular: Perusahaan menerapkan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan praktik sirkular yang selaras dengan prinsip halal.
5. Kepercayaan dan akses pasar: Produk dan layanan bersertifikat halal mendapatkan akses ke pasar domestik dan pariwisata, termasuk destinasi ramah Muslim.
6. Bisnis kompetitif berkelanjutan: Kinerja operasional, kinerja keuangan, dan keunggulan bersaing dicapai melalui integrasi jaminan halal dengan kapabilitas kewirausahaan, kepercayaan digital, dan praktik berkelanjutan.

Lingkaran pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan—Measure → Learn → Adapt → Reinvest—memastikan bahwa hasil pasar menginformasikan adaptasi organisasi dan pengembangan kapabilitas berkelanjutan.

Kondisi implementasi untuk Banyuwangi meliputi: program literasi halal; pengembangan sumber daya manusia; fasilitasi biaya sertifikasi; pembangunan kapabilitas teknologi; dan koordinasi dukungan institusional. Program "Si Kedip Wangi" secara langsung menangani tiga kondisi pertama, sementara pusat halal berbasis universitas dan infrastruktur digital mendukung dua kondisi terakhir.

Basis bukti: Studi empiris mendukung tautan terpilih dalam jalur ini. Azizah et al. (2025) menemukan bahwa sertifikasi halal berhubungan positif dengan kinerja operasional dan keuangan pada 925 UMKM Indonesia. Kristanto dan Kurniawati (2025) melaporkan hubungan positif antara sertifikasi halal, ketahanan rantai pasok, keunggulan bersaing, dan kinerja keuangan pada UMKM makanan beku Indonesia. Kerangka terintegrasi secara keseluruhan, bagaimanapun, memerlukan validasi kontekstual untuk Banyuwangi

4.3. Tantangan Implementasi dan Roadmap 12 Bulan

Kerangka terintegrasi yang dikembangkan dalam studi ini memerlukan pendekatan implementasi bertahap karena daya saing halal tidak dapat dicapai hanya melalui sertifikasi. Bukti yang dikaji dalam artikel ini menunjukkan bahwa UMKM Banyuwangi terus menghadapi kendala yang saling terkait meliputi kesadaran regulasi, kesiapan sertifikasi, kapabilitas administratif, sumber daya manusia, konsistensi rantai pasok, adopsi teknologi, pembiayaan, dan koordinasi institusional.

Roadmap yang diusulkan menerjemahkan kerangka konseptual menjadi program pengembangan kapabilitas 12 bulan. Alih-alih memperlakukan sertifikasi sebagai output akhir, roadmap ini menempatkan sertifikasi sebagai titik awal untuk urutan yang lebih luas meliputi kapabilitas halal-by-design, ketertelusuran digital, kewirausahaan, model bisnis sirkular, pengembangan pasar, dan pemantauan hasil. Pendekatan ini konsisten dengan bukti bahwa sertifikasi, kapabilitas organisasi, ketertelusuran, kewirausahaan, dan dukungan institusional perlu dihubungkan agar jaminan halal dapat menghasilkan nilai bisnis yang lebih luas..

5. Kesimpulan

Studi ini mengonseptualisasikan inovasi halal sebagai sistem kapabilitas terintegrasi, bukan sebagai titik akhir sertifikasi. Bukti yang dikaji dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa jaminan halal dapat dihubungkan dengan kapabilitas kewirausahaan, kepercayaan dan ketertelusuran digital, operasi sirkular dan berkelanjutan, pengembangan ekosistem regional, dan inovasi yang dimediasi universitas. Dalam interpretasi ini, sertifikasi menyediakan fondasi institusional untuk jaminan halal, tetapi nilai bisnis potensialnya bergantung pada kapabilitas organisasi dan mekanisme ekosistem yang melaluinya jaminan tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan operasional, inovasi, akses pasar, dan keberlanjutan jangka panjang.

Analisis Banyuwangi lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi inovasi halal harus peka terhadap konteks. Banyuwangi dicirikan dalam studi ini oleh basis UMKM yang substansial, kapasitas produksi pertanian dan perikanan, fasilitasi pemerintah daerah yang proaktif untuk sertifikasi halal, pusat halal berbasis universitas, dan pengembangan pariwisata dan destinasi yang sedang berkembang. Kondisi ini memberikan dasar bagi jalur berorientasi produksi dan destinasi di mana kapabilitas sertifikasi, perbaikan proses, kepercayaan digital, kewirausahaan, dan ekspansi pasar dapat dikembangkan secara bersamaan. Jalur Banyuwangi adalah konfigurasi kontekstual yang komplementer, bukan peringkat kinerja regional

6. Referensi

- Aisyah, E. N., Prajawati, M. I., & Yuliati, Y. (2025). Entrepreneurship orientation and business performance: Do business strategy and government policy matter? *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(1), 170–184. <https://doi.org/10.17358/ijbe.11.1.171>
- Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1673–1705. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2022-0229>
- Astuti, R. P., Armanu, Wijayanti, R., & Yuniarinto, A. (2023). Model implementation of halal certification essence for micro, small and medium business in East Java. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2646>
- Aswad, M., Bahktiar, J., & Budiman, A. (2025). Analysis of problems and solutions of halal industry in East Java. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*. <https://ejournal.uisntau.ac.id/index.php/arrehla/article/view/10736>
- Azizah, S. N., Koeswinarno, K., Salam, A. N., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & Fakhruddin, M. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(6), 1271–1290. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0463>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Rencana strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 2025–2029.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026a). Wajib halal Oktober 2026, momentum pelaku usaha tingkatkan daya saing. <https://bpjph.halal.go.id/read/wajib-halal-oktober-2026-momentum-pelaku-usahatingkatan-daya-saing>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026b). Tak hanya makanan-minuman, ini jenis produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. <https://bpjph.halal.go.id/read/tak-hanya-makanan-minuman-ini-jenis-produk-yang-wajib-bersertifikat-halal-mulai-18-oktober-2026>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026c). Perkuat implementasi wajib halal Oktober 2026, pemerintah gelar rakor di KSP. <https://bpjph.halal.go.id/read/perkuat-implementasi-wajib-halal-oktober-2026-pemerintah-gelar-rakor-di-ksp>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2026). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi 2025. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/pressrelease/2026/04/29/267/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-banyuwangi-2025.html>
- Bank Indonesia. (2025). Laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2025.
- Bank Indonesia. (2026). Laporan perekonomian Indonesia 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI-2025_05_Bab-3.pdf

- Banyuwangi Regency Government. (2024). Telah jangkau puluhan ribu pelaku usaha, Banyuwangi kembali fasilitasi sertifikasi halal gratis UMKM. <https://banyuwangikab.go.id/public/berita/telah-jangkau-puluhan-ribu-pelaku-usaha-banyuwangi-kembali-fasilitasi-sertifikasi-halal-gratis-umkm>
- Banyuwangi Tourism. (2026). Bukan sekadar liburan Nataru 2025, fenomena WFA bikin wisatawan betah berlama-lama di Banyuwangi. <https://www.banyuwangitourism.com>
- Bappenas-GGGI. (2025). Bappenas-GGGI inisiasi kebijakan investasi di sektor industri daur ulang, perkuat rantai nilai plastik berkelanjutan. Ministry of National Development Planning/Bappenas.
- Bappenas. (2025a). White paper: Unveiling the future of sustainable business through empowering green MSMEs. Ministry of National Development Planning/Bappenas.
- Bappenas. (2025b). Green SMEs and net zero: Strategic framework for Indonesia's climate-aligned economic transformation. Ministry of National Development Planning/Bappenas.
- Emerald Publishing. (2025). Online traceability for halal product: A study of Muslim consumers in Indonesia. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIMA-01-2023-0012/full/html>
- Garuda. (2026). Green Halal business model: Integrating Maqasid al-Shari'ah and circular economy. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Harsanto, B., Pradana, M., Yunani, A., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., Farras, J. I., & Nabila, F. S. (2025). Halal value chain: A structured literature review and meta-analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 16(4), 1095–1117. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0387>
- Harwati, H., Asih, A. M. S., & Sopha, B. M. (2025). Resilience in halal supply chain: From definition to framework. *Journal of Islamic Marketing*, 16(8), 2187–2223. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2024-0067>
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (2025). Blockchain-IoT based halal food supply chain innovations. <https://www.its.ac.id>
- IPB University. (2025, December 1). IPB University resmikan Gedung Inkubator Bisnis Halal. <https://ipb.ac.id>
- Khan, N., Falahat, M., Ullah, I., Sikandar, H., & Van, N. T. (2025). Integrating halal tourism with sustainable development goals through Islamic values environmental responsibility and technological innovation. *Discover Sustainability*, 6, Article 648. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01503-3>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021). Strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia.
- Kristanto, D., & Kurniawati, D. A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: Halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. *Journal of Islamic Marketing*, 16(10), 3092–3114. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0278>
- Kurniawati, D. A., & Cakravastia, A. (2023). A review of halal supply chain research: Sustainability and operations research perspective. *Cleaner Logistics and Supply*

- LPPOM MUI. (2025). Halal certification challenges for MSMEs in Indonesia. <https://www.halalmui.org>
- Nawangsari, E. R., Yusuf, R. R., Admin, H. N., & Anggoro, D. (2024). Performance of halal certification policies in East Java Province. *Nusantara Science and Technology Proceedings*. <https://doi.org/10.11594/nstp.2024.4169>
- Prawiro, A., & Fathudin, F. (2024). Challenges in the halal industry ecosystem: Analyzing the halal certification process for micro, small, and medium enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *Mazahib*, 22(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010>
- Rofiah, K., Sa'adah, S. L., Safira, M. E., Rohmanu, A., & Haji Matali, A. B. (2024). Legal awareness of halal products certification among East Java business operators and society. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(1), 55–65. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10467>
- RRI. (2026, May 4). Sebanyak 22 ribu UMKM Banyuwangi kantongi sertifikat halal. <https://rri.co.id/jember/ekonomi/umkm/2388665/sebanyak-22-ribu-umkm-banyuwangi-kantongi-sertifikat-halal>
- Suara Muhammadiyah. (2026, June 5). Eco Bhinneka branding 207 ribu UMKM lewat program Prabuwangi dan Si Kedip Wangi. <https://www.suaramuhammadiyah.id>
- Tazkia University. (2025). Startup Incubator and Tazkia Halalpreneur Hub. <https://tazkia.ac.id>
- UIMSYA. (2026, February 12). Halal Center UIMSYA Blokagung Banyuwangi hadir RAKORNAS LP3H Nasional, perkuat komitmen pendampingan sertifikasi halal. <https://uimsya.ac.id/halal-center-uimsya-blokagung-banyuwangi-hadiri-rakornas-lp3h-nasional-perkuat-komitmen-pendampingan-sertifikasi-halal/>
- UIN Raden Mas Said. (2025). Institute of Halal Industry. <https://iain-surakarta.ac.id>